

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1985, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Aristeus, Syprianus, 2007, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Barlyan, Nalom Kurniawan, 2020, *Penetapan Tersangka & Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Dressler, Joshua, dan Michael, Alan, 2002, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Routledge-Cavendish, New York.
- Eddyono, Supriyadi W., et al., 2012, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktik*, Institute Criminal Justice Reform, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Ginting, Miko Susanto, 2014, *Mendorong Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Parlemen, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Hodgson, Jacqueline, 2005, *French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution of Crime in France*, Hart Publishing, Oxford

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mahfud MD, Moh., 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.
- McBride, Jeremy, 2009, *Human Rights and Criminal Procedure: The Case Law of The European Court of Human Rights*, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mudzakir, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2006, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Pangaribuan, Luhut M. P., 2002, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2008, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Redaksi Bhafana Publishing, 2017, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Bhafana Publishing, Yogyakarta.

- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Setiadi, Edi, dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Simbolon, Antonius Benari, 2020, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeparmono, R., 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.
- Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Sujanto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S. W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Singkat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tak, P. J. P., 2008, *The Dutch Criminal Justice System*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen.
- Tim RUU-KUHAP, 2008, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, *United Nations Convention Against Corruption*, United Nations, New York.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Wibowo, Kurniawan Tri, 2021, *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.
- Yanto, 2013, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta.

## B. Jurnal

- Abdullah, M. Zen, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 1, Februari 2020.
- Adji, Indriyanto Seno, "Hakim Komisaris: Solusi Kearah Prinsip Keadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32, No. 3, Juli-September 2002.
- Adyan, Antory Royan, "Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengawas Penyidik dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa", *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.
- Afandi, Fachrizal, "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016.
- Aruan, Ukkap Marolop "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 2, April 2014.
- Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Barama, Michael, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 8, 2016.
- Boyoh, Masyelina, "Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, Juni 2015.
- Darwin, *et.al.* "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1, Juni 2019.
- Dien, Jessy G., "Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, Maret 2019.
- Grande, Elisabetta, "Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 48, No. 2, 2000.
- Hamzah, Andi, "Relationship Between Investigator and Prosecutor in Draft of Indonesian Criminal Procedural Law (RKUHAP)", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 2, No. 5, December 2014.
- Illuminati, Giullio, "The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy (Italian Criminal Procedure Code of 1988)", *Washington University Global Studies*, Vol. 4, No. 5, 2005.

- Latifah, Marfuatul, “Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?”, *Negara Hukum*, Vol. 12, No. 01, Juni 2021.
- Maringka, Jan S., “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Maringka, Rifaldi Jesaya, “Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23, No. 10, Desember 2017.
- Marpaung, Ramsen dan Moeliono, Tristam Pascal, “Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, September 2021.
- McCabe, Peter G., “A Guide to The Federal Magistrate Judges System”, *Makalah*, Paper Prepared at the Request of the Federal Bar Association, United States of America, Agustus 2014.
- Mirabella, Julia Grace, “Scales of Justice: Assessing Italian Criminal Procedure Through The Amanda Knox Trial”, *Boston University International Law Journal*, Vol. 30, No. 1, April 2012.
- Muhaimin, “Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, Juni 2016.
- Novikoff, Harold S., “The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules”, *Columbia Law Review*, Vol. 74, No. 01, Januari 1974.
- Nugroho, Evin Dwi, dan Pujiyono, “Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Pidana”, *Jurnal Belo*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Nurahman, Dwi, “Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015”, *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2015.
- Nurhaqi, Ari, “Implementasi Konvensi Anti Penyiksaan dan KUHAP”, *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2020.
- Pandiangan, Hendri Jayadi, “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata” *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017.

- Plangiten, Maesa, “Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 6, Oktober 2013.
- Pro, Philip M., “United States Magistrate Judges: Present but Unaccounted for”, *Nevada Law Journal*, Vol. 16, No. 3, June 2016.
- Purba, Tumian Lian Daya, “Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka”, *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.
- Risdalina, “Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.3, No. 1, Maret 2015.
- Sari, Devi Kartika, *et al*, “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*, Maret 2015.
- Simamora, Janpatar, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.
- Siratni, Mia, “Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam Pandangan Teori Negara Hukum”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1, No. 9, Oktober 2019.
- Situmorang, Morgan, “Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana”, *De Jure*, Vol. 18, No. 4, Desember 2018.
- Sumampouw, Rafely S. D., “Kajian Hukum tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 1, Januari-Maret 2018.
- Sunderland, Edson R., “The Theory and Practice of Pre-Trial Procedure”, *Michigan Law Review*, Vol. 36, No. 2, Desember 1937.
- Tajudin, I, “Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Turner, Jenia Iontcheva, “The Exclusionary Rules as a Symbol of the Rule of Law”, *Southern Methodist University Law Review*, Vol. 67, No. 4, 2014.
- Wulandari, S., “Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana”, *Serat Acitya*, Vol. 4, No. 3, 2015.

### C. Disertasi

Stojanovski, Voislav, 2011, “*Towards Harmonized Standards for Pre-Trial Detention Procedures Throughout the European Union*”, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Masaryk University, Czech Republic.

Supriyadi, 2015, “Reformulasi Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum oleh Militer di Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.

### D. Makalah

Adji, Indriyanto Seno, “Praperadilan Ataukah Hakim Komisaris: Ide ke Arah Perluasan Wewenang”, *Makalah*, Sosialisasi RUU KUHAP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 22 Juli 2002.

Alkostar, Artidjo, “Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidanaan serta Judicial Immunity”, *Makalah*, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

Djaksa, I.G.N. Gde, “Proses Pembahasan Penyusunan KUHAP Menuju Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia”, *Makalah*, Jakarta, 10 Desember 1981.

Hamzah, Andi, “Hakim Komisaris dan Kewenangannya”, *Makalah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Muzakir, “Hakim Komisaris dalam Perubahan RUU-KUHAP”, *Makalah*, Focus Group Discussion Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.

Nasution, Adnan Buyung, “Pra-peradilan Versus Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya”, *Makalah*, Sosialisasi RUU KUHAP di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 27 November 2001.

### E. Internet

“Agar Tersangka tak Tersandera, FKHK Bakal Gugat Pasal 50 KUHAP”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12024>

Anjarsari, Lulu, “MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13480>

“Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>.

Hiariej, Eddy O. S., “Beberapa Catatan RUU KUHAP dalam Hubungannya dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/article/eddy-os-hiariej-beberapa-catatan-ruu-kuhap-dalam-hubungannya-dengan-pemberantasan-tipikor>

Hidayat, Rofiq, “Pertimbangan Rancangan KUHAP Bakal Jadi Usul Inisiatif DPR”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-rancangan-kuhap-bakal-jadi-usul-inisiatif-dpr-lt63a198e5b64df?page=1>.

“Hukum Acara Pidana: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981”, <https://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf>

“International Covenant on Civil and Political Rights”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Data HAM Aktual”, <https://dataaduan.komnasham.go.id/#/>.

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, “Netherlands Institute of Human Rights”, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/NetherlandsNHRI.docx>.

Offices of The United States Attorneys, “Steps in the Federal Criminal Process”, <https://www.justice.gov/usao/justice-101/initial-hearing>.

“Program Legislasi Nasional”, <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/62>.

Sodikin, Amir, “Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dinilai Terlalu Besar”, <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/20/20323937/~Nasional>.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention#:~:text=No%20person%20under%20any%20form,or%20degrading%20treatment%20or%20punishment>.

Utama, Abraham, “KY Hukum Sarpin Enam Bulan Non-Palu”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630201946-12-63429/ky-hukum-hakim-sarpin-enam-bulan-non-palu>.

## **F. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

### **G. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Perihal Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Susandhi, 22 April 2010.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 167/PID/2010/PT.DKI Perihal Permohonan Banding Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Susandhi, 5 November 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perkara Anggara, *et. al.*, 24 Februari 2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 Perihal Permohonan Kasasi Susandhi, 31 Mei 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perkara Tjetje Iskandar, 01 Mei 2012.

Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Perihal Permohonan Praperadilan Bachtar Abdul Fatah, 27 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Bachtar Abdul Fatah, 28 April 2015.

Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Perihal Permohonan Praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., 16 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, 07 September 2016.

Putusan Praperadilan Nomor 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Perihal Permohonan Praperadilan Ryan Seftriadi, 29 Agustus 2016.

Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid.Pra/2017/PN.Mnd. Perihal Permohonan Praperadilan Paulus Iwo, 24 Februari 2017.